

**ARTIKEL**  
**ANALISIS PENERAPAN WEBSITE DALAM RANGKA E-GOVERNMENT**  
**DI KABUPATEN TEGAL**

**Rizka, Suwitri, Djumiarti**

**Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik**

**Universitas Diponegoro**

**Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang**

**ABSTRAKSI**

Teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communication Technology/ICT*) menjadi sangat penting dalam era globalisasi . Saat ini mulai tumbuh dengan apa yang disebut *electronic government (e-gov)* sebagai implementasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Salah satu penerapan *E gov* pada organisasi pemerintahan yaitu *website* pemerintah daerah. Kabupaten Tegal belum memanfaatkan sumber daya. *Website* pemerintahan di Kabupaten Tegal, sebagai tolok ukur yang paling sederhana dalam melihat implementasi *e-government*, isinya masih bersifat informasi yang sangat umum dan jarang untuk di *update*. Masalah yang muncul adalah bagaimana penerapan *website* di Kabupaten Tegal. Tujuan penelitian yaitu menjelaskan penerapan *website* dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat penerapan *website* di Kabupaten Tegal. Upaya menjawab permasalahan ini dengan menggunakan Teori Prinsip Manajemen G.R. Terry dan Teori Elemen Sukses *E-government Harvard JFK School*. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *website* di Kabupaten Tegal berada pada tahap kedua yaitu tahap pematangan, Hal ini dapat dilihat dari *Support, Capacity* dan *Value* di Kabupaten Tegal. Hambatan penerapan *website* di Kabupaten Tegal yaitu pelaksanaan regulasi oleh Pemerintah Daerah yang belum maksimal, kerusakan jaringan oleh faktor alam, kurangnya sosialisasi bagi masyarakat, ego sektoral di beberapa SKPD serta minimnya anggaran dari Pemerintah Daerah. Perbaikan jaringan yang rusak, meningkatkan sosialisasi bagi masyarakat, adanya perencanaan anggaran yang baik serta meningkatkan kemampuan pegawai merupakan saran perbaikan.

Kata Kunci : Penerapan *Website, Support, Capacity dan Value*.

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Otonomi daerah memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk memajukan daerahnya dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengembangkan inovasi, strategi dan ide-ide baru agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Pada zaman globalisasi sekarang ini, Teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat penting karena dapat menembus jarak yang jauh sehingga mempermudah setiap orang dalam berkomunikasi. Dengan adanya kemajuan teknologi ini maka pemerintah harus dapat memanfaatkannya dengan baik. Dalam tujuannya memperbaiki kualitas layanan publik, meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta banyak manfaat positif lainnya maka *e-government* merupakan sesuatu yang perlu untuk dilakukan oleh organisasi pemerintahan. (Indrajit,2004:5). *E-Government* menjadi sangat populer sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (*informatioan and communication technology-ICT*). Saat ini hampir semua pemerintahan daerah di Indonesia sudah mempunyai *website*, dengan isi informasi umum seperti struktur organisasi, visi dan misi, alamat pejabat-pejabat, informasi pariwisata, pendidikan dan sebagainya. Salah satunya yaitu dengan adanya *website* Kabupaten Tegal yaitu [www.tegalkab.go.id](http://www.tegalkab.go.id).

*E-government* merupakan suatu sarana penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik(Indrajit,2004:2). Konsep *e-government* berkembang karena adanya tiga pemicu utama yaitu perkembangan era globalisasi yang cepat,kemajuan teknologi dan informasi serta meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat. Salah satu penerapan *e-government* yaitu dengan adanya *website* pemerintah daerah. Lewat *website* ini masyarakat dapat mengetahui potensi daerah dan mengetahui tentang jalannya pemerintahan. Mencermati penerapan *website* di Kabupaten Tegal, terlihat belum dimanfaatkannya secara maksimal sumber daya yang ada, baik sumber daya infrastruktur teknologi komunikasi,

sumber daya manusia, dan sebagainya. *Website-website* pemerintahan yang ada, sebagai tolok ukur yang paling sederhana dalam melihat implementasi *e-government*, isinya masih bersifat informasi yang sangat umum dan jarang untuk di *update*. Untuk memenuhi aspek informasi, maka Pemerintah Kabupaten Tegal harus dapat menyajikan potensi-potensi yang ada pada daerah tersebut sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya. Namun dalam pelaksanaannya *website* resmi PemKab Tegal masih memiliki banyak kendala. Menurut pegawai Dishubkominfo Kab Tegal kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran, kurangnya pemeliharaan jaringan dan kurangnya kesadaran

*Website* Pemerintah Kabupaten Tegal dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika. *Website* ini sendiri berdiri pada tahun 2007 berdasarkan Perda Kabupaten Tegal No 3 tahun 2007. Awalnya *Website* ini di kelola oleh BIKK ( Badan Informasi, Komunikasi dan Kehumasan) atas nama instansi BIKK. Namun pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tegal No 13 tahun 2008 maka Tupoksi Informatika pindah ke Dishubkominfo bidang Teknologi Informasi, Pos dan Telekomunikasi. Menurut observasi yang telah dilaksanakan maka proses penyelenggaraan *e-government* pada Kabupaten Tegal berada pada Tahap kedua yaitu Tahap Pematangan. Hal tersebut dibuktikan melalui kualitas *website* yang masih kurang memadai, kurangnya kemampuan SDM dan kurangnya sosialisasi. Secara garis besar hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan *website* di Kabupaten Tegal antara lain:

- a. Dilihat dari segi *support*, peraturan seputar *e-government* yang masih lemah. Undang – undang dan peraturan – peraturan yang akan dijadikan landasan hukum penggunaan *e-government* pada pemerintah Kabupaten Tegal belum dijalankan secara maksimal.
- b. Dilihat dari segi *capacity*, belum adanya pemahaman yang tepat mengenai esensi *e-gov* dikarenakan lemahnya sisi SDM baik dari aparatur pemerintah daerah maupun masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pegawai yang membidangi TI, Pos dan Telekomunikasi sudah menguasai

komputer namun pegawai di Dinas lainnya dan masyarakat belum sepenuhnya menguasai komputer.

- c. Dilihat dari segi *value*, bahwa belum sepenuhnya masyarakat mengenal tentang *e-gov* karena belum semua perangkat daerah terutama Lurah dapat memanfaatkan IT dalam proses pemerintahan. Mereka terbiasa menggunakan cara manual sehingga mereka belum dapat mengetahui manfaat dari penerapan *website*.

## **1.2. Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan penerapan *website* di Kabupaten Tegal.
2. Menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat penerapan *website* di Kabupaten Tegal.

## **1.3. Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.3.1. Manajemen**

Salah satu dasar agar organisasi dapat berjalan dengan baik adalah adanya manajemen yang baik pula. Manajemen merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam disiplin ilmu administrasi publik. Berbagai konsep manajemen dikemukakan oleh tokoh – tokoh yang berandil besar dalam disiplin ilmu manajemen maupun administrasi publik.

Marry Parker Follet mendefinisikan manajemen sebagai berikut :

”Manajemen sebagai suatu seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang lain”. (Darmadi,2009:15).

Sondang P.Siagian mengemukakan manajemen sebagai :

“Kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu dalam rangka pencapaian tujuan melalui usaha atau kegiatan orang lain”. (Darmadi,2009:15).

G.R. Terry mendefinisikan arti manajemen yaitu :

“Manajemen merupakan pencapaian sasaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain”. (Darmadi,2009:16).

Menurut G.R.Terry, menyatakan bahwa fungsi – fungsi utama manajemen yaitu : (Handoko, 2003 :23)

1. *Planning*

Perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan – tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek,program, prosedur, metode, sistem,anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

2. *Organizing*

Pengorganisasian adalah penentuan sumber daya – sumber daya dan kegiatan – kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi.

3. *Actuating*

*Actuating* adalah menggerakkan orang untuk melaksanakan aktifitas organisasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

4. *Controlling*

Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Luther Gullick mengemukakan beberapa fungsi manajemen yang kemudian terkenal dengan POSDCORB. Fungsi tersebut antara lain: (T. Hani Handoko, 2003 : 22)

1. perencanaan (*planning*)
2. pengorganisasian (*organizing*)
3. pengadaan staff (*staffing*)
4. pengarahan (*directing*)
5. pengkoordinasian (*controlling*)
6. pelaporan (*reporting*)
7. penganggaran. (*budgeting*)

### 1.3.2. E-GOVERNMENT

*E-Government* adalah suatu upaya dalam penyalenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ([www.wartawarga.gunadarma.ac.id](http://www.wartawarga.gunadarma.ac.id)) diakses pada 15 November 2011).

Bank Dunia mendefinisikan *e-Government* sebagai berikut:

*“E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government.”*(Indrajit, 2004:2)

UNDP (*United Nation Development Programme*) mendefinisikan *e-government* secara lebih sederhana, yaitu:

*“E-government is the application of the Information and Communication Technology (ICT) by government agencies”*. (Indrajit, 2004:2)

Clay G. Wescott mendefinisikan *e-government* sebagai (Indrajit,2004:4-5):

*“E-government is the use of information and communications technology (ICT) to promote more efficiency and cost-effective government, facilitate more convenient government services, allow greater public access to information, and make government more accountable to cittizens.”*

Menurut hasil kajian dan riset dari *Harvard JFK School of Goverment* untuk menerapkan konsep - konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh – sungguh. Masing masing elemen sukses tersebut adalah : ( Indrajit, 2004:15-16)

- a. *Support*, Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar – benar menerapkan konsep *e-gov* bukan hanya sekedar mengikuti *trend* atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip – prinsip *e-gov*.

- b. *Capacity*, yang dimaksud *capacity* adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan impian *e-gov* terkait menjadi kenyataan.
- c. *Value*, berbagai inisiatif *e-gov* tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut. Untuk itu maka pemerintah harus teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi *e gov* agar memberikan *value* yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakat.

Jenis proyek *e-gov* dapat dibagi menjadi tiga kelas utama yaitu (Indrajit, 2004:29) :

1. *Publish*, jenis ini merupakan implementasi *e-gov* yang termudah karena selain proyeknya yang berskala kecil, kebanyakan aplikasinya tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam.
2. *Interact*, berbeda dengan kelas *publish* yang sifatnya pasif, pada kelas *Interact* telah terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan.
3. *Transact*, adalah interaksi dua arah seperti pada kelas *interact* hanya saja terjadi dua transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya. Contohnya masyarakat dapat mengurus permohonan memperoleh KTP baru atau memperpanjangnya melalui internet.

Di dalam konsep *E-gov* dikenal pula empat jenis klasifikasi yaitu : (Indrajit, 2004: 41) :

1. *Government to Citizens*, merupakan aplikasi *e-gov* yang paling umum yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai porto folio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Contohnya kepolisian membangun dan menawarkan jasa pelayanan perpanjangan SIM dan STNK melalui internet.

2. *Government to Bussiness*, salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Contohnya para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasis *web* untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet.
3. *Government to Government*, kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal – hal yang berbau diplomasi semata namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti – entiti negara dalam melakukan hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses – proses politik, dll. Contohnya yaitu aplikasi yang menghubungkan kantor – kantor pemerintah setempat dengan bank-bank asing milik pemerintah di negara lain dimana pemerintah setempat menabung dan menanam uangnya.
4. *Government to Employes*, pada akhirnya aplikasi *e-gov* juga diperuntukan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja disejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat. Contohnya yaitu sistem pengembangan karir pegawai pemerintah.

### **1.3.3 Good Governance**

Paradigma *Good governance* beranggapan bahwa suatu pemerintahan yang baik adalah yang berorientasi kepada masyarakat dan bukan lagi kepada birokrat atau dengan kata lain pemerintahan yang sedang mereformasi diri melaksanakan wirausaha birokrasi. (Suwitri,2008:25).

Pengertian *Good Governance* menurut UNDP yaitu sebagai berikut

“*Good Governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and service*.” (Istianto, 2009 : 108)

Sedangkan menurut Healy dan Robinson (1992:64) mengatakan bahwa:

“*Good Governance* bermakna tingkat efektifitas organisasi yang tinggi dalam hubungan dengan formulasi kebijakan dan kebijakan yang senyatanya.” (Istianto, 2009 : 107)

Prinsip *good governance* yang menurut UNDP (dalam Sedarmayanti,2003) meliputi : (Istianto, 2009 : 110)

a. Partisipasi (*Participation*)

Setiap orang atau warga masyarakat memiliki hak suara sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan.

b. Aturan Hukum (*Rule of Law*)

Kerangka aturan hukum dan perundang – undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh (*impartially*).

c. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi.

d. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*)

e. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)

Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus.

f. Berkeadilan (*Equity*)

Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

g. Efektifitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Setiap mproses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar – benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan berbagai sumber sumber yang tersedia.

h. Akuntabilitas (*Accountability*)

Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana halnya kepada para pemilik.

i. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

j. Saling Keterbukaan (*Interrelated*)

Keseluruhan ciri *good governance* tersebut adalah saling memperkuat dan saling terkait dan tidak dapat berdiri sendiri.

#### **1.4. Metode Penelitian**

Peneliti menggunakan tipe eksploratif yaitu untuk memperdalam pengetahuan mengenai analisis penerapan *website* di Kabupaten Tegal. Penggunaan tipe eksploratif dimaksudkan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggali obyek yang akan diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak.

## PEMBAHASAN

### 2.1.Penerapan Elemen Sukses *E-government* di Kabupaten Tegal

Menurut hasil kajian dan riset dari *Harvard JFK School of Government* elemen pendukung kesuksesan *e-government* antara lain *support*, *capacity*, dan *value*. Adapun penerapan elemen kesuksesan pelaksanaan *website* di Kabupaten Tegal antara lain:

#### 2.1.1. *Support*

##### 2.1.1.1. *Political Will*

Dukungan pemerintah terhadap teraplikasikannya *e-government* di Kabupaten Tegal antara lain Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*, Permenkominfo No 28 tahun 2006 tentang Penggunaan Nama *Domain go.id* untuk *Situs Web* Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2007 tentang APBD tahun 2007. Namun untuk pelaksanaannya ada yang sudah dijalankan dan ada yang belum dijalankan secara maksimal. Adapun tabel mengenai peraturan seputar *e-gov* di Kabupaten Tegal yaitu antara lain:

**Tabel 4.1.**

#### Peraturan seputar *E-gov* di Kabupaten Tegal

No	Peraturan <i>E-gov</i>	Kondisi Nyata	Keterangan
1.	Inpres No 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-gov</i> .	Belum Dijalankan secara maksimal	Dalam Inpres No 3 tahun 2003 dijelaskan bahwa ada empat tahapan dalam pengembangan <i>e-gov</i> yaitu persiapan, pematangan, pe

			<p>mantapan dan pemanfaatan. <i>E-gov</i> di Kabupaten Tegal hanya sampai pada tahap pematangan.</p>
2	<p>Permenkominfo Nomor 28 tahun 2006 Tentang Penggunaan nama <i>Domain go.id</i> untuk situs <i>Web Resmi</i> Pemerintahan Pusat dan Daerah.</p>	Sudah dijalankan	<p>Dalam Permenkominfo Nomor 28 tahun 2006 dijelaskan bahwa setiap <i>situs web</i> baik Pemerintah Pusat maupun Daerah menggunakan nama <i>domain go.id</i>. Hal ini sudah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal terbukti dengan penggunaan nama <i>website</i> <a href="http://www.tegalkab.go.id">www.tegalkab.go.id</a></p>
3	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 tahun 2007 tentang APBD tahun 2007</p>	Belum dijalankan secara maksimal	<p>Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 tahun 2007 dijelaskan bahwa dalam APBD Pemerintah Kabupaten Tegal terdapat alokasi anggaran untuk pengadaan <i>website</i> namun dalam kenyataannya setiap tahun belum tentu cair.</p>

Sumber: Dishubkominfo Kabupaten Tegal 2012.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa peraturan seputar *e-gov* yang sudah dijalankan di Kabupaten Tegal yaitu Permenkominfo Nomor 28 tahun 2006 Tentang Penggunaan nama *Domain go.id* untuk situs *Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah*. Hal ini sudah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal terbukti dengan penggunaan alamat *website* [www.tegalkab.go.id](http://www.tegalkab.go.id). Selain itu ada beberapa peraturan yang belum dijalankan secara maksimal antara lain Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-gov* dan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 3 tahun 2007 tentang APBD tahun 2007. Dalam Inpres nomor 3 tahun 2003 dikatakan bahwa ada beberapa tahapan dalam pengembangan *electronic government* yaitu :

1. Tingkat Persiapan, antara lain:
2. Tingkat Pematangan, antara lain:
3. Tingkat Pemantapan, antara lain:
4. Tingkat Pemanfaatan, antara lain :

Dalam *website* pemerintah Kabupaten Tegal hanya sampai pada tahap dua yaitu tahap pematangan. Hal ini dibuktikan dengan Pembuatan situs *web* pemerintah, Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia menuju penerapan *e-government*, Penyediaan sarana akses publik, Sosialisasi keberadaan layanan informasi elektronik, Pembuatan situs informasi layanan publik interaktif dan Pembuatan hubungan dengan situs informasi lembaga lainnya. Suatu *website* dapat dikatakan maju apabila sudah sampai pada tahap ke empat yaitu pemanfaatan. Namun kenyataannya pada *website* Kabupaten Tegal belum mencapai tahap itu. Hal ini dikarenakan *website* Kabupaten Tegal memiliki keterbatasan di bidang anggaran dan kurangnya kerjasama dengan pihak swasta sehingga sulit untuk mengembangkan ke tahap yang lebih tinggi.

Selain itu peraturan yang belum dijalankan secara maksimal yaitu tentang Perda No 3 tahun 2007 tentang APBD tahun 2007. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa dalam APBD telah ditetapkan anggaran untuk pengadaan *website* di Kabupaten Tegal. Namun dalam kenyataannya anggaran yang cair masih kurang memadai bahkan pada tahun 2008 tidak ada anggaran yang cair.

#### 2.1.1.2. Infrastruktur

Infrastruktur merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan *website*. Infrastruktur ini tidak hanya berupa barang fisik saja tetapi juga biaya pemeliharaan jaringan. Infrastruktur dalam penerapan *website* di Kabupaten Tegal berkembang pada setiap tahunnya dan mengalami peningkatan. Dalam setiap SKPD telah terkoneksi oleh jaringan sehingga memudahkan dalam penyampaian informasi.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala alam yaitu hujan petir dan angin puting beliung. Misalnya di daerah Kedungbanteng sudah terkena petir sampai tiga kali. Selain itu di Rumah Sakit Dokter Susilo Slawi juga jaringannya terkena angin puting beliung. Dengan adanya kerusakan jaringan ini maka dapat mengganggu jalannya pemerintahan

#### . 2.1.1.3. Sosialisasi

Sosialisasi tentang adanya *website* ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal. Sosialisasi dilakukan melalui *website* itu sendiri dan surat resmi pada setiap SKPD. selain itu disiarkan dalam radio Pertiwi FM Slawi. Namun dalam sosialisasi ini mengalami hambatan yaitu sosialisasi tersebut lebih intensif kepada dinas antar SKPD tetapi kurang adanya sosialisasi terhadap masyarakat. Hal tersebut

dibuktikan dengan setiap tahun pemerintah hanya satu kali mengadakan sosialisasi secara langsung antara pemerintah dengan masyarakat. Pada tahun 2010 dan 2011 pemerintah hanya mengadakan satu kali sosialisasi dengan masyarakat yaitu Darma Wanita dan Ormas NU. Sosialisasi tersebut juga dilaksanakan dengan mengadakan kerjasama dengan pihak Telkom.

## **2.1.2. Capacity**

### **2.1.2.1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia dalam penerapan *website* ini terdiri dari kemampuan pegawai yang mengelola *website* dan juga masyarakat.. Sumber daya manusia yang mengelola *website* yaitu pegawai di Dishubkominfo sudah cukup mahir dalam menguasai teknologi informasi. Namun untuk pegawai di Dinas-dinas lain hanya sebagian saja yang menguasai teknologi informasi.

Selain itu ada beberapa hambatan dalam sumber daya manusia ini yaitu kurangnya kesadaran dari pegawai / adanya ego sektoral menjadi penghambat dalam penerapan *website* ini. Dishubkominfo telah memberikan *email* kepada setiap SKPD agar dapat berkomunikasi dengan baik. Namun hal ini tidak diimbangi oleh kesadaran pegawainya. Hanya beberapa SKPD yang memberikan berita sehingga *website* tersebut kurang *update*. Selain kemampuan pegawainya, kemampuan masyarakat juga perlu untuk diperhatikan. Masyarakat disini dibagi dalam dua kelompok yaitu masyarakat yang berpendidikan dan masyarakat yang kurang berpendidikan. Bagi masyarakat yang berpendidikan hampir seluruhnya sudah menguasai internet sedangkan masyarakat yang kurang berpendidikan belum dapat mengoperasikan internet.

#### 2.1.2.2. Sumber Daya *Financial*

Sumber Daya Finansial merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam penerapan *website* ini dan untuk menerapkan *website* dibutuhkan anggaran yang besar. Untuk itu dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menyediakan anggaran. Anggaran yang dibutuhkan tidak hanya berupa barang fisik saja tetapi juga membutuhkan biaya untuk pemeliharaan jaringan. Setiap tahun terdapat penambahan beberapa titik jaringan di beberapa SKPD sehingga biaya untuk pemeliharaannya juga bertambah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 tahun 2007 maka Pemerintah Kabupaten Tegal telah menyediakan anggaran yang tercantum dalam APBD. Anggaran tersebut disusun oleh Dishubkominfo kemudian diajukan kepada Bappeda. Namun dalam pelaksanaannya anggaran yang cair semakin menurun, bahkan pada tahun 2008 anggaran tersebut tidak cair. Anggaran merupakan elemen penting dalam pelaksanaan *website* sehingga keberadaannya perlu diperhatikan.

#### 2.1.3. *Value*

##### 2.1.3.1. Manfaat

Manfaat dari diterapkan *website* di Kabupaten Tegal yaitu dapat memberikan informasi tentang potensi daerah yang ada di Kabupaten Tegal. Selain itu masyarakat dapat berkomunikasi dengan pemerintah mengenai pemerintahan daerah. Masyarakat dapat memberikan kritik dan saran kepada pemerintah setelah diterapkannya *website* tersebut. Kritik dari masyarakat biasanya berupa keluhan tentang kerusakan jalan, pelayanan KTP ataupun pelayanan rumah sakit. Pemerintah juga dapat merespon tanggapan masyarakat dengan menghubungi dinas yang terkait.

### 2.1.3.2. Masyarakat

Masyarakat merupakan elemen utama dalam penerapan *website* di Kabupaten Tegal. Tanpa dukungan masyarakat maka penerapan *website* tidak akan berhasil. *Website* ini memiliki banyak manfaat sehingga dengan adanya *website* ini maka masyarakat dapat ikut berpartisipasi terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten Tegal. Namun sayangnya tidak semua masyarakat Kabupaten Tegal dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. Khususnya masyarakat yang kurang berpendidikan.

*Website* yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Tegal telah dapat memberikan informasi tentang potensi daerah yang ada di Kabupaten Tegal. Selain itu masyarakat juga dapat memberikan kritik dan saran maupun keluhan terhadap pelayanan yang ada di Kabupaten Tegal. Dalam *website* ini juga telah disediakan buku tamu dimana masyarakat dapat berkomentar dan memberikan kritik saran terhadap jalannya pemerintahan.

## 2.2. Analisis Tahapan Penerapan *Electronic Government* di Kabupaten Tegal

Penerapan *e-government* di setiap lembaga pemerintah harus mengacu kepada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* (INPRES No. 3 Tahun 2003). Model penerapan *e-government* di setiap lembaga pemerintah disusun dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan *e-government* Lembaga dan memuat tahapan pengembangan dan penerapan *e-government* dalam bentuk :

- a. Kerangka Pemikiran Dasar Lembaga (*e-government Conceptual Framework*);
- b. Cetak Biru Pengembangan (*e-government Blueprint*);
- c. Solusi Pentahapan Pengembangan (*e-government Roadmap*);

d. Rencana Implementasi (*e-government Implementation Plan*);

Pentahapan dalam penerapan *e-government* disetiap lembaga pemerintah mengikuti:

1. Tingkat Persiapan, antara lain:

- a. pembuatan situs *web* pemerintah (lihat buku Panduan Penyelenggaraan *Situs Web* Pemerintah Daerah) di setiap lembaga
- b. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia menuju penerapan *e-government*
- c. penyediaan sarana akses publik antara lain dalam bentuk *Multipurpose Community Center* (MCC), Warung dan kios Internet, dan lain-lain
- d. sosialisasi keberadaan layanan informasi elektronik, baik untuk publik maupun penggunaan internal;
- e. pengembangan motivasi kepemimpinan (*e-leadership*) dan kesadaran akan pentingnya manfaat *e-government* (*awareness building*);
- f. penyiapan peraturan pendukung.

2. Tingkat Pematangan, antara lain:

- a. pembuatan situs informasi layanan publik interaktif, antara lain dengan menambahkan fasilitas mesin pencari (*search engine*), fasilitas tanya jawab dan lain-lain
- b. pembuatan hubungan dengan situs informasi lembaga lainnya (*hyperlink*).

3. Tingkat Pemantapan, antara lain:

- a. Penyediaan fasilitas transaksi secara elektronik antara lain dengan menambahkan fasilitas penyerahan formulir, fasilitas pembayaran dan lain-lain;
- b. penyatuan penggunaan aplikasi dan data dengan lembaga lain (*interoperabilitas*).

4. Tingkat Pemanfaatan, antara lain :
  - a. pembuatan berbagai aplikasi untuk pelayanan G2G (*Government to Government*), G2B (*Government to Bussines*) dan G2C (*Govern-ment to Community*) yang terintegrasi;
  - b. pengembangan proses layanan *e-government* yang efektif dan efisien;
  - c. penyempurnaan menuju kualitas layanan terbaik (*best practice*).

Penyelenggaraan *website* di Kabupaten Tegal berada pada tahap kedua, yaitu pada tahap pematangan. Hal ini dibuktikan dengan Pembuatan situs *web* pemerintah, Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia menuju penerapan *e-government*, Penyediaan sarana akses publik, Sosialisasi keberadaan layanan informasi elektronik, Pembuatan situs informasi layanan publik interaktif dan Pembuatan hubungan dengan situs informasi lembaga lainnya.

### **2.3. Hambatan Dalam Penerapan *Website* di Kabupaten Tegal**

Penerapan *Website* di Kabupaten Tegal mempunyai beberapa kendala yang menghambat perkembangan *website*. Kendala-kendala tersebut yaitu berkaitan dengan regulasi, kerusakan infrastruktur, kurangnya sosialisasi, budaya organisasi dan adanya ego sektoral, kurangnya *financial*, dan kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengoperasikan internet. Sehingga Pemerintah Kabupaten Tegal harus mengambil langkah dalam menghadapi kendala yang ada.

Hambatan yang pertama yaitu tentang regulasi yang belum dilaksanakan secara maksimal. Dalam Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-gov* dikatakan bahwa ada empat tahap pengembangan *e-gov*, namun *website* di Pemerintah Kabupaten Tegal hanya sampai pada tahap kedua yaitu pematangan. Hal

ini disebabkan karena kurangnya anggaran yang akan digunakan agar *website* tersebut dapat lebih maju.

Hambatan yang kedua yaitu adanya kerusakan infrastruktur. Misalnya terjadinya kerusakan jaringan karena faktor alam yaitu hujan petir dan angin puting beliung. Dengan adanya kerusakan ini maka dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Selain itu sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal juga masih kurang. Hal ini terbukti dengan setiap tahun hanya ada satu kali sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dan pegawai di masing-masing SKPD.

Sumber daya manusia ataupun kemampuan pegawai serta masyarakat pengguna pelayanan sangat mempengaruhi kesuksesan penerapan *e-government* pada suatu daerah. Dalam pelaksanaan *E-government* di Kabupaten Tegal kurang adanya kesadaran pegawai untuk mendukung terlaksananya pemerintahan yang berbasis internet ini. Selain itu masih terdapat ego sektoral di beberapa SKPD di Kabupaten Tegal.. Selain itu tingkat penggunaan internet masyarakat Kabupaten Tegal juga masih kurang. Selain dari faktor sumber daya manusia, dari segi pendanaan atau *financial* dalam pengembangan dan pelaksanaan *E-government* juga mengalami hambatan. Hal ini dikarenakan dana yang diperoleh hanya berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Tegal dan belum ada *stakeholder* yang bekerjasama dalam mengembangkan *E-government* yang ada di Kabupaten Tegal.

## KESIMPULAN

### 3.1.KESIMPULAN

#### 3.1.1. Penerapan *Website* di Kabupaten Tegal

Penerapan *website* di Kabupaten Tegal telah berada pada tahap tingkat yang kedua, yaitu tingkat pematangan. Hal tersebut diidentifikasi melalui sejauh mana terlaksananya elemen penting pendukung *e-government* yang dikemukakan menurut hasil kajian dan riset *Harvard JFK School of Government*, untuk menetapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh, elemen tersebut antara lain *support*, *capacity*, dan *value*. (Indrajit, 2004 : 15-16)

1. *Support* merupakan elemen utama dalam pelaksanaan *e-government*. Dukungan pemerintah menjadi salah satu faktor pokoknya sehingga komitmen dari pemerintah menjadi sangat penting. Namun Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal belum dapat melaksanakan peraturan seputar *e-gov* secara maksimal. Infrastruktur penerapan *e-government* di Kabupaten Tegal sudah memadai dalam melaksanakan pemerintahan yang berbasis teknologi ini. Namun masih terdapat beberapa kerusakan jaringan karena faktor alam dan kurangnya biaya pemeliharaan. Selain itu sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal belum maksimal.
2. Elemen yang kedua yaitu *capacity*, kemampuan pemerintah untuk menerapkan *e-government* merupakan unsur penting.. Dishubkominfo Kabupaten Tegal mempunyai tenaga ahli dalam pemanfaatan teknologi informasi, tetapi di setiap SKPD hanya ada beberapa pegawai saja yang menguasai teknologi informasi. Selain itu adanya ego sektoral di beberapa SKPD yang tidak mau menyampaikan informasi. Anggaran yang dialokasikan dalam penerapan *e-government* ini masih kurang memadai. Hal ini terbukti dengan setiap tahun anggaran yang dicairkan tidak pasti.

3. Elemen yang ketiga adalah *value*. Penerapan *website* harus mempunyai asas manfaat bagi masyarakat, swasta, ataupun pemerintah. Masyarakat memperoleh banyak manfaat dari penerapan *website* tersebut.. Masyarakat dapat mengetahui info seputar Kabupaten Tegal dengan cara mengakses *website* ini. Selain itu masyarakat dapat memberikan kritik dan saran kepada pemerintah daerah melalui buku tamu.

### 3.1.2. Hambatan dalam Penerapan *Website* di Kabupaten Tegal

Adapun beberapa hambatan yang terjadi dalam penerapan *website* di Kabupaten Tegal, antara lain:

1. Pelaksanaan regulasi oleh Pemerintah Daerah yang belum maksimal. Dalam Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-gov* dikatakan bahwa ada empat tahap pengembangan *e-gov*, namun *website* di Pemerintah Kabupaten Tegal hanya sampai pada tahap kedua yaitu pematangan.
2. Kerusakan jaringan yang disebabkan oleh faktor alam. Misalnya terjadinya kerusakan jaringan karena faktor alam yaitu hujan petir dan angin putting beliung. Dengan adanya kerusakan ini maka baik pegawai maupun masyarakat tidak dapat menikmati *hotspot area* sehingga mengganggu jalannya pemerintahan.
3. Kurangnya sosialisasi bagi masyarakat. Hal ini terbukti dengan setiap tahun hanya ada satu kali sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dan pegawai di masing-masing SKPD.
4. Adanya budaya organisasi dan ego sektoral di beberapa SKPD. Dalam pelaksanaan *E-government* di Kabupaten Tegal kurang adanya kesadaran pegawai untuk mendukung terlaksananya pemeritahan yang berbasis internet ini.
5. Minimnya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan dana yang diperoleh hanya berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Tegal dan belum ada *stakeholder* yang bekerjasama dalam mengembangkan *E-government* yang ada di Kabupaten Tegal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE.
- Indrajid, Richardus Eko. 2004. *Electronic Government (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital)*. Yogyakarta: ANDI.
- Indrajit, Richardus Eko. 2005. *E – Government In Action*, Yogyakarta : ANDI
- Istianto, Bambang. 2009. *Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Suwitri, Sri. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang : Universitas Diponegoro
- Sumber lainnya:
- Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*
- Permenkominfo No 28 tahun 2006 tentang penggunaan Nama *Domain go.id*. Untuk *Situs Web* Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Perda Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2007 tentang APBD tahun 2007.
- Website:*
- Selayang Pandang Kabupaten Tegal*. (2012). Dalam <http://www.tegalkab.go.id> diunduh pada 6 November 2011 pukul 11.00 WIB.
- Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Untuk Kebutuhan Diklat di Kabupaten Sidenreng Rappang*. (2012). Dalam <http://repository.unhas.ac.id> diunduh 8 November 2012 pukul 09.00 WIB
- Pengertian e-government*. (2009). Dalam <http://www.wartawarga.gunadarma.ac.id> diunduh pada 15 November 2011 pukul 18.00 WIB.
- Website Pemerintah Daerah Sebagai Sarana Informasi dan Komunikasi Daerah*. (2007). Dalam <http://devry.wordpress.com> diunduh pada 17 November 2011 pukul 08.00 WIB.